

DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG TERHADAP PROGRAM JKN

dr. Rita Rogayah, Sp.P(K), MARS
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kementerian Kesehatan

Jakarta, 28 Mei 2020

PELAYANAN KESEHATAN

PKM/Klinik

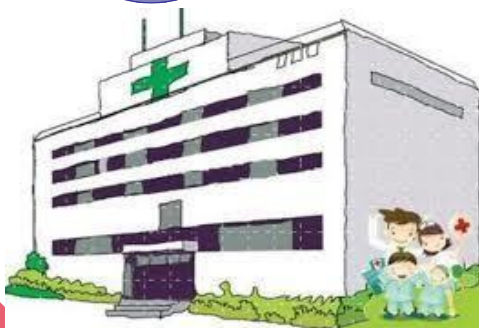


Akses kebutuhan TT per kab
/kota 1 : 1000 penduduk (WHO)

Pemerataan Fasyankes dasar
dan rujukan yang bermutu
melalui intervensi peningkatan mutu

FKTP
FKRTL

• Pelayanan
SDM
• Sarana, Prasarana dan Alkes



Rumah Sakit

AKSES

MUTU

Indikator Mutu

Akreditasi
FKTP RS

INDIKATOR RPJMN – INDIKATOR RENSTRA

Reformasi Kesehatan Nasional



Insentif BOK berbasis kinerja
Jasa telemedicine
Kontrak Pelayanan Non-Pemerintah



Riset Vaksin & Produk Biologi
(Kerja sama Eijkman dan Biofarma)



Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
Integrasi Big Data BPJS-K, RS & Puskesmas
Sistem Rujukan Terintegrasi



Ketersediaan dan kecukupan OBMHP Puskesmas & RS
Pengembangan Bahan Baku Obat dan Vaksin
Keamanan Produk Alat Kesehatan
Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri
Pengawasan pre-post market Alat Kesehatan

PEMBIAYAAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

PENELITIAN &
PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN

TENAGA
KESEHATAN

MANAJEMEN &
SISTEM INFORMASI

FARMASI
& ALKES

Keterlibatan Swasta (klinik Pratama) untuk UKM
Digitalisasi Pelayanan Posyandu (E-PPGBM)
(input data dengan Android dan tablet; data terhubungkan ke pusat data dan expert system)



Percepatan Penemuan kasus & kesembuhan HIV & Kusta
Surveilans malaria
Penguatan Health Security
Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas
Pusat Register Imunisasi
Rujukan Kesehatan Masyarakat



Puskesmas: Pemenuhan nakes,
Penguatan fungsi promotif, preventif, Pelayanan daerah geografis sulit (pelayanan kesehatan bergerak, kontrak pelayanan CSR),
Puskesmas sesuai standar/akreditasi
Telemedicine di daerah terpencil
Penguatan peran FKTP Lain dalam mendukung program nasional



RS: Khusus Rujukan Nasional, RS *Center of Excellence*
RS Pratama di daerah TTT, Peningkatan TT RS (120.000 TT, bertahap)
RS aktif dalam promotif & preventif
Jejaring Pelayanan Kesehatan, digitalisasi pelayanan



Tenaga Kesehatan:
Redistribusi internal Kab/kota, *Sister hospital*
Beasiswa, LPDP, CPNS (Wajib penempatan, Spesialis & 9 jenis nakes)
Penambahan prodi langka, & Penutupan prodi jenuh
Perluasan pendidikan spesialis berbasis rumah sakit

PERAN FKRTL DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Kendali biaya

Kendali mutu

**HARUS MEMENUHI
STANDAR PELAYANAN
YANG OPTIMAL**

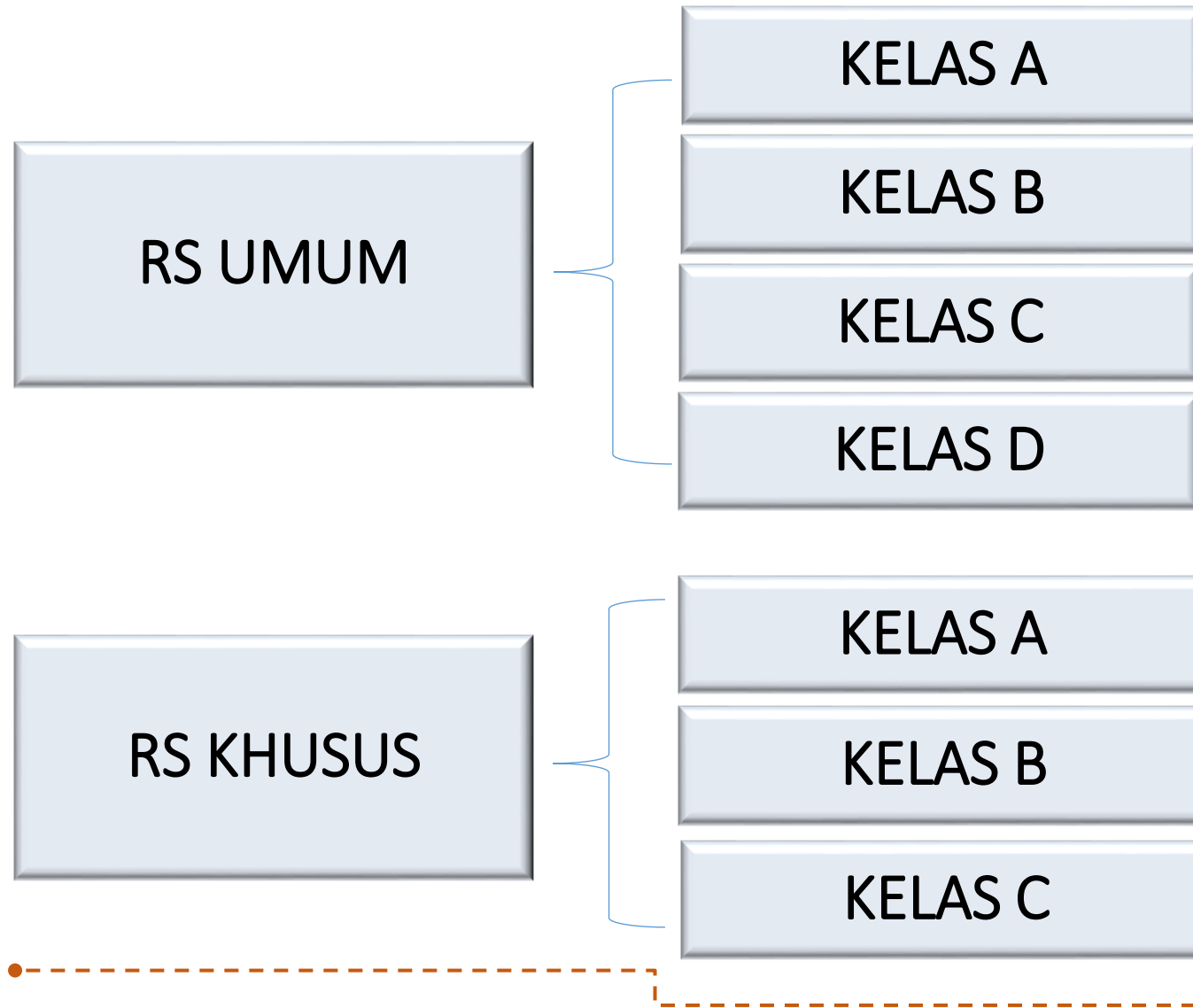
Standar Penyelenggaraan Pelayanan sama untuk semua kelas Rumah Sakit

Patient safety

Contoh :

- Standar Cathlab,
- standar ICU,
- Standar HCU,
- Standar Hemodialisis
- Standar pelayanan kanker dan radiotherapy, dll

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT (PP 47 TAHUN 2021)



KETENTUAN :

01

Pemerintah menetapkan klasifikasi RS berdasarkan:

- Kemampuan Pelayanan
- Fasilitas Kesehatan
- Sarana Penunjang
- Sumber Daya Manusia

02

Menjabarkan gambaran RS Umum dan RS Khusus berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, bangunan dan prasarana, ketersediaan tempat tidur, dan peralatan, serta Sumber Daya Manusia.

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

KONSEP KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

PELAKU USAHA

PROGRAM
PEMERINTAH

KEBUTUHAN MASYARAKAT

BATANG TUBUH

+

Wajib ada

+/-

Pilihan

LAMPIRAN

KEMAMPUAN PELAYANAN

merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit umum dan rumah sakit khusus yang dipenuhi berdasarkan ketersediaan SDM, bangunan, sarana dan peralatan

FASILITAS DAN SARANA PENUNJANG

Terdiri atas bangunan dan prasarana, ketersediaan tempat tidur rawat inap, dan peralatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

SDM

Terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan, disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan

PELAYANAN

merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit

FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG,

Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas: (a). bangunan dan prasarana (b). ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan (c). peralatan

SDM

Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit

KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR

RS UMUM

Kelas A Paling Sedikit 250 TT
Kelas B Paling Sedikit 200 TT
Kelas C Paling Sedikit 100 TT
Kelas D Paling Sedikit 50 TT

RS KHUSUS

Kelas A Paling Sedikit 100 TT
Kelas B Paling sedikit 75 TT
Kelas C Paling Sedikit 25 TT

RS KHUSUS Gigi dan Mulut

Kelas A paling sedikit 14 TT dan 75 dental unit
Kelas B paling sedikit 12 TT dan 50 dental unit
Kelas C paling sedikit 10 TT dan 25 dental unit

RS KHUSUS THT KL dan Mata

Kelas A Paling Sedikit 40 TT
Kelas B Paling Sedikit 25 TT
Kelas C Paling Sedikit 15 TT

DIKECUALIKAN
BAGI
RS KHUSUS
GILUT,
MATA DAN
THT-KL

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur

- a. 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif/ICU; dan
- a. 4% untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas perawatan intensif neonatus dan perawatan intensif pediatrik (NICU dan PICU).

RUANG SEBAGAI TEMPAT ISOLASI

- Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur
- Dalam kondisi **wabah atau KKM**, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi paling sedikit:
 - a. 30% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan Pemda; dan
 - a. 20% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik swasta.

RUMAH SAKIT PMA

- Jumlah tempat tidur RS Umum PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS Umum kelas B
- Jumlah tempat tidur untuk RS Khusus PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS kelas A pada setiap jenis Rumah Sakit khusus.

ATAU SESUAI KESEPAKATAN/KERJA SAMA INTERNASIONAL

Total tempat tidur meliputi tempat tidur ruang perawatan, tempat tidur kelas standar, perinatologi, intensif, ruang bersalin, intermediate ward (IW) yang ada di IGD (apabila lebih dari 6 (enam) jam).

Tempat tidur ruang gawat darurat, ruang rawat jalan dan ruang kamar operasi tidak dihitung dalam total tempat tidur.

Perhitungan Tempat Tidur RS Kelas Standar Rawat Inap

Tempat Tidur Kelas Standar Jumlah tempat tidur kelas standar

- 60% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

RS UMUM

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

paling lambat
1 Januari 2023

Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur

- a. 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif/ICU; dan
- b. 4% untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas perawatan intensif neonatus dan perawatan intensif pediatrik (NICU dan PICU).

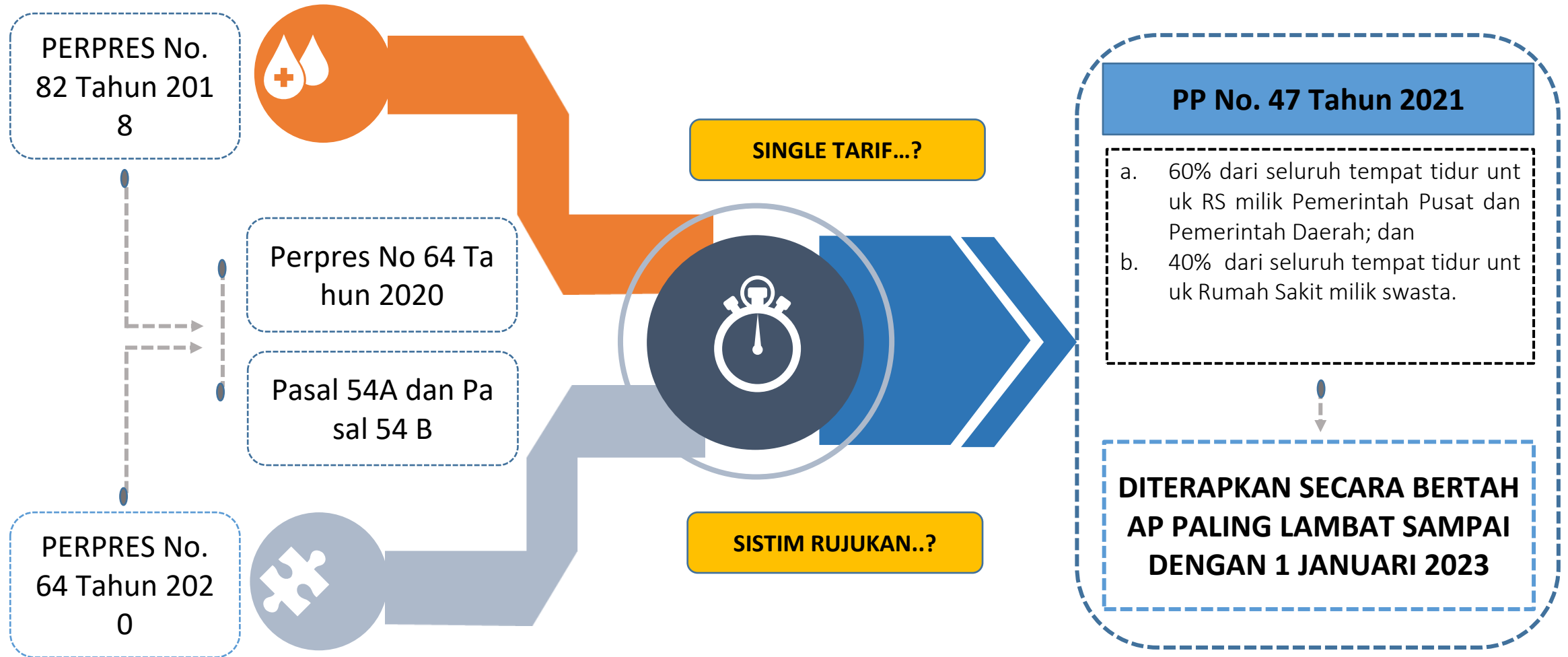
RS KHUSUS

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

paling lambat
1 Januari 2023

- a. paling sedikit 10% dari seluruh jumlah total TT
- b. RS tidak menyediakan layanan PICU, NICU, ICCU dan RICU menyediakan TT ICU sejumlah 10%
- c. RS Khusus mata, RS Khusus Gilut, RS Khusus THT-KL tidak wajib memenuhi TT intensif
- d. RS jiwa berupa Unit Pelayanan Intensif Psikiatri sebesar 10%
- e. RS jiwa yang menyelenggarakan pelayanan diluar kekhususannya wajib →
 - 10% dari total TT yang dipergunakan sesuai dengan Kekhususannya
 - intensif sejumlah 6% dari total TT di luar kekhususannya.

KELAS STANDAR




IMPLEMENTASI KELAS STANDAR DALAM JKN



**Kelas standar perawatan:
2 kelas (PBI dan non PBI)**

kelas 4 TT dan 6 TT
semester II 2020-2021



kelas standar
tunggal

Awal Tahun 2023



Rencana
Single Tarif
dalam
program JKN

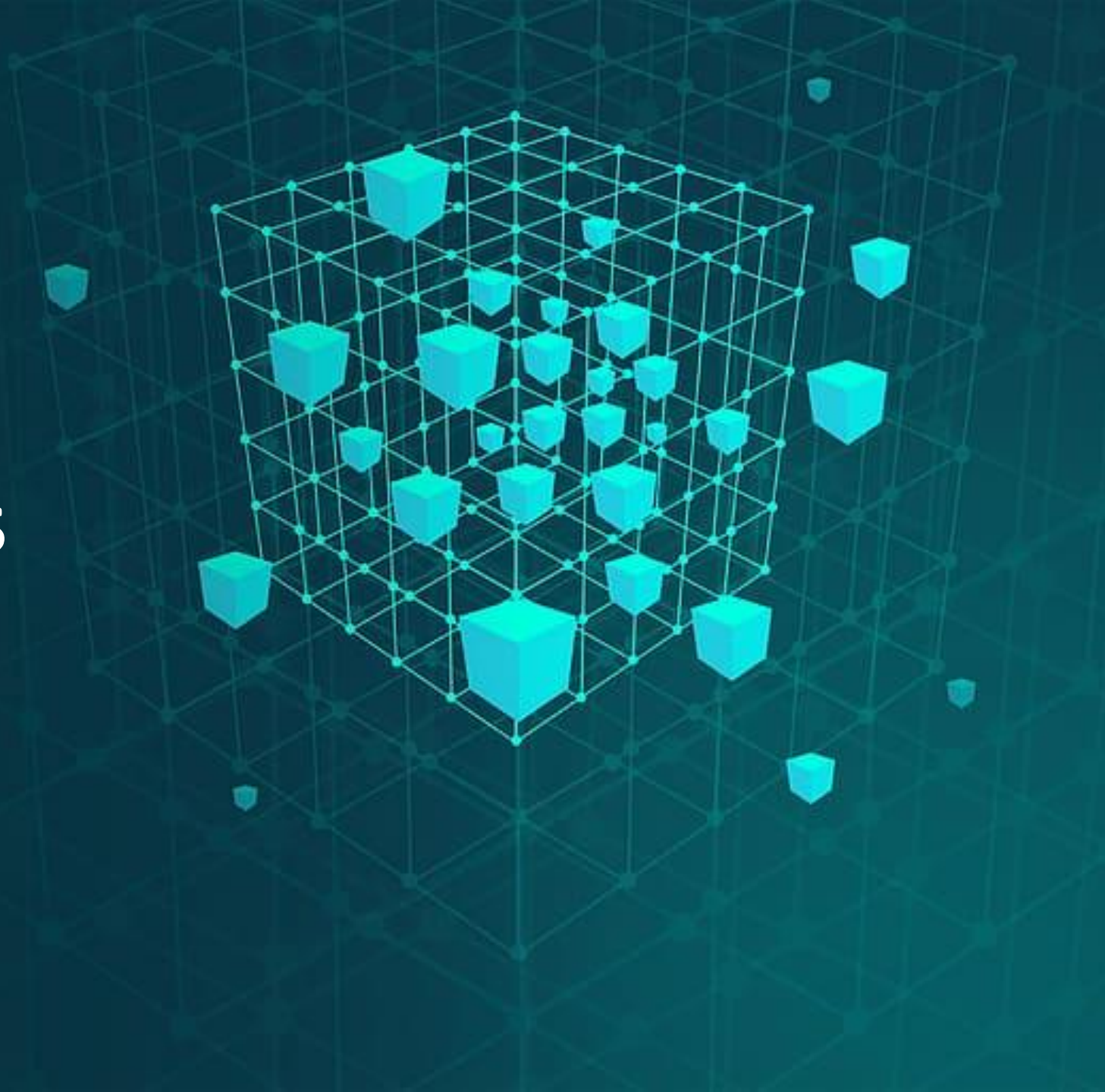
DRAFT PEDOMAN RAWAT INAP

KRITERIA UMUM

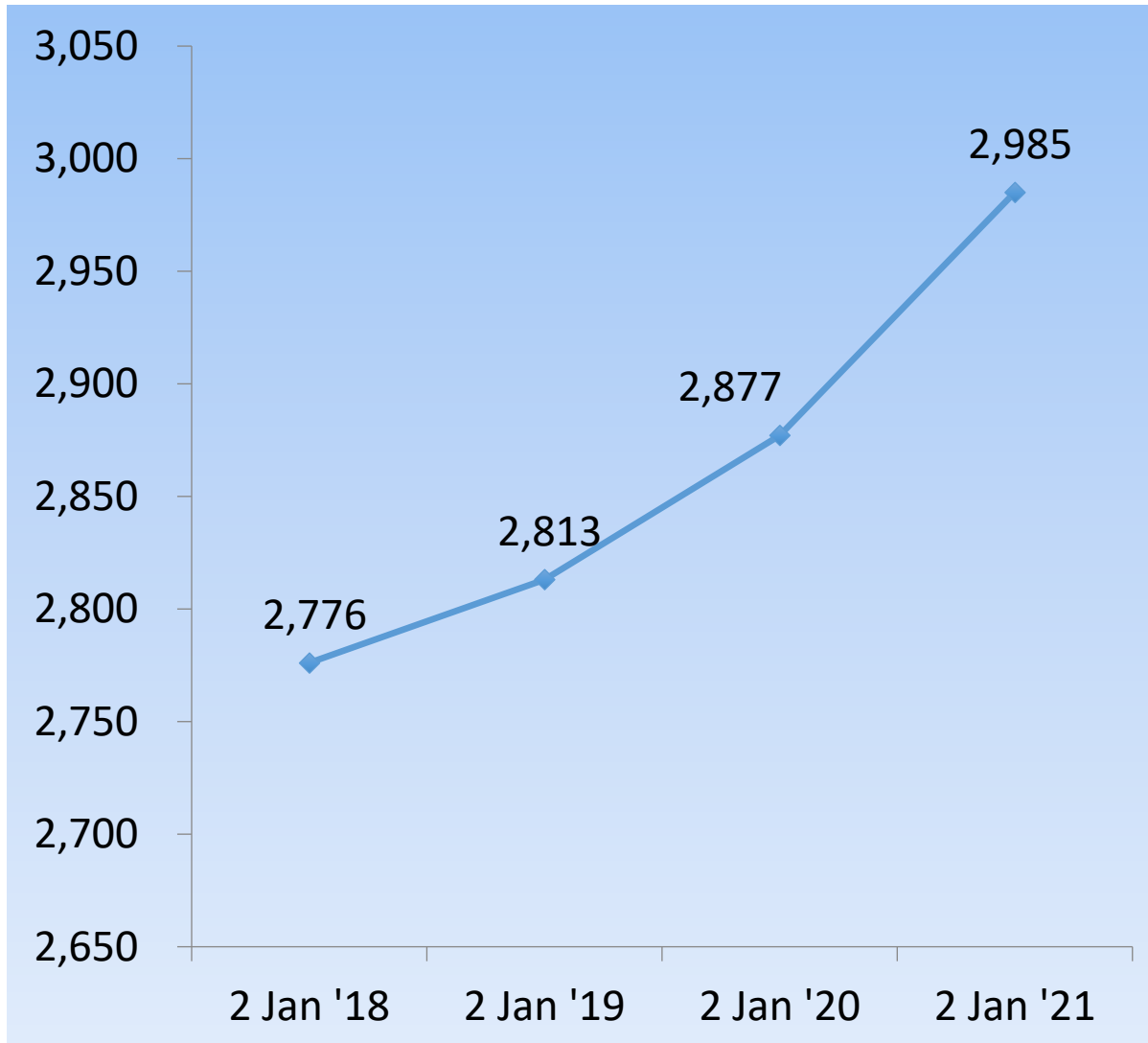
- Suhu ruangan 24 ± 2 °C
- Kelembaban ruangan $55 \pm 5\%$
- Pencahayaan 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur
- Jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter

Kelas III (6 TT)	Kelas II (4 TT)	Kelas I (2 TT)
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tempat tidur: max 6 TT dengan pengaman • 1 tempat duduk/pasien • 1 kamar mandi pasien/ruangan • 1 nakas per tempat tidur • AC sentral/AC split/kipas angin/ventilasi natural • Gorden/partisi antar TT • Pelayanan gizi /menu makanan sesuai standar RS • 1 overbed table/TT 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tempat tidur : max 4 TT dengan pengaman • 1 tempat duduk/pasien • 1 kamar mandi pasien/ruangan • 1 nakas per tempat tidur • AC sentral/AC Split/kipas angin • Gorden/partisi antar TT • Pelayanan gizi/menu makanan sesuai yang ditetapkan RS • 1 overbed table/TT 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tempat tidur max. 2 TT dengan 2 crank dengan automatic/manual • 1 tempat duduk/pasien • 1 kamar mandi pasien /ruangan • 1 nakas pertempat tidur • AC sentral/AC split • Gorden/partisi antar TT • Pelayanan gizi/Menu makanan sesuai yang ditetapkan RS • 1 Overbed table/TT • 1 unit TV/ruangan

DATA KONDISI FASKES



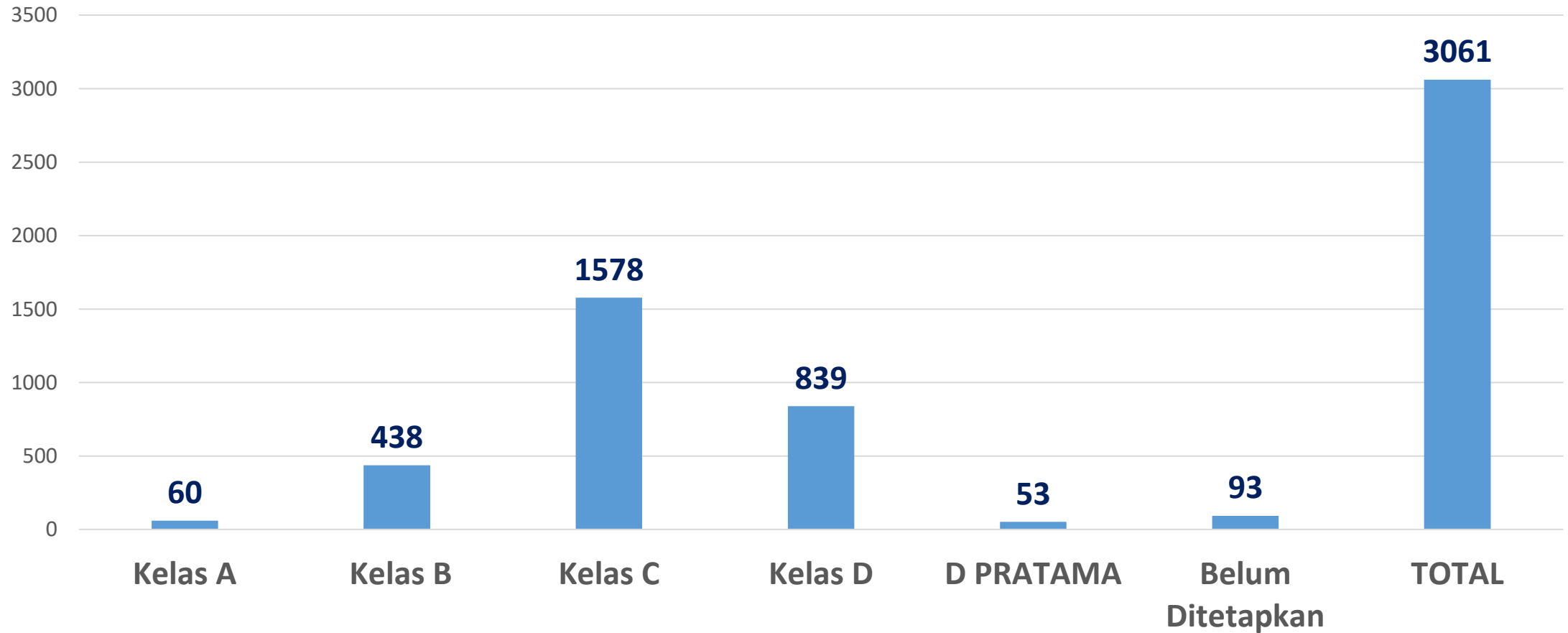
TREN RS TEREKISTRASI AWAL TAHUN 2018 - 2021



Penyelenggara	02-Jan-18	02-Jan-19	02-Jan-20	02-Jan-21
Kemkes	33	33	34	35
Pemprop	136	141	143	150
Pemkab	508	529	548	580
Pemkot	84	90	97	102
TNI/POLRI	171	165	164	165
BUMN/KL	77	68	61	62
Swasta	1.767	1.787	1.830	1.891
Grand Total	2.776	2.813	2.877	2.985

Sumber Data: RS Online

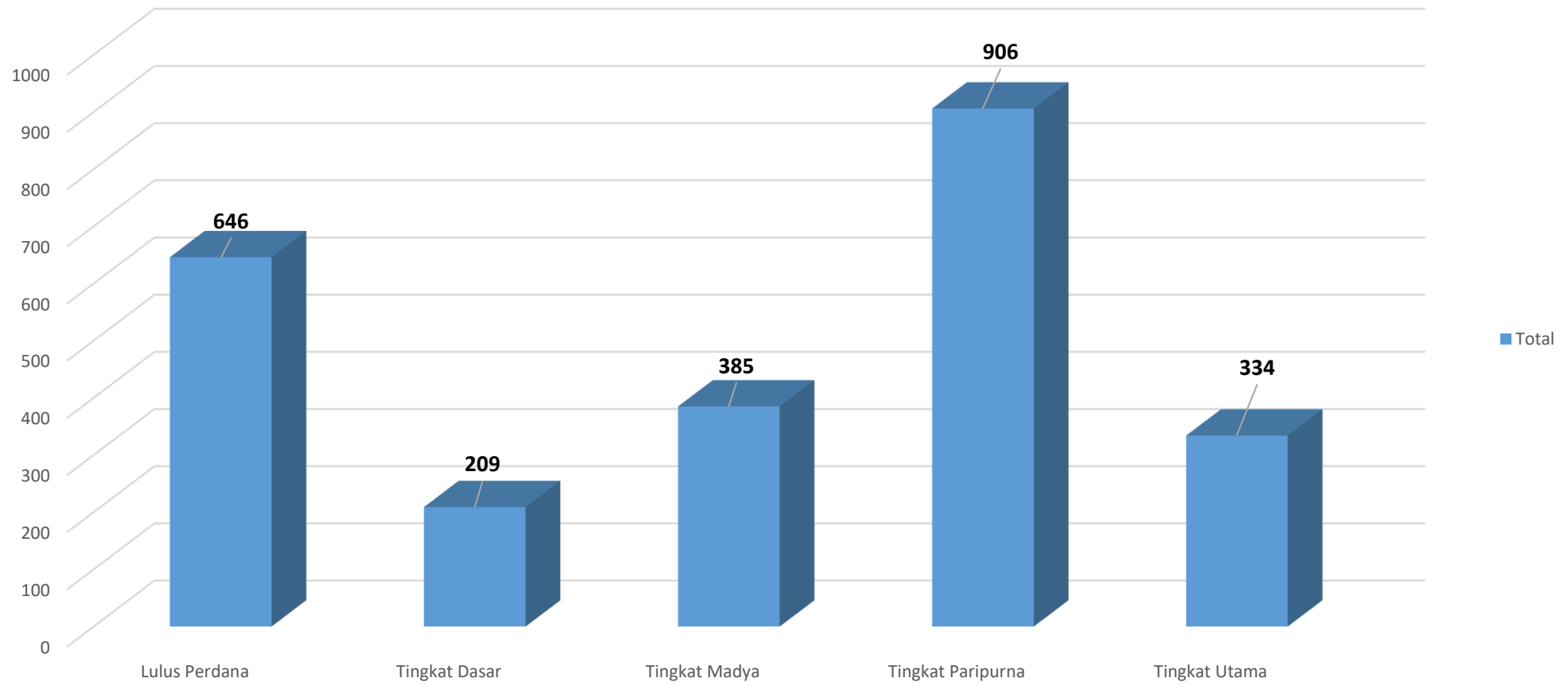
DATA RS BERDASARKAN KELAS TAHUN 2021



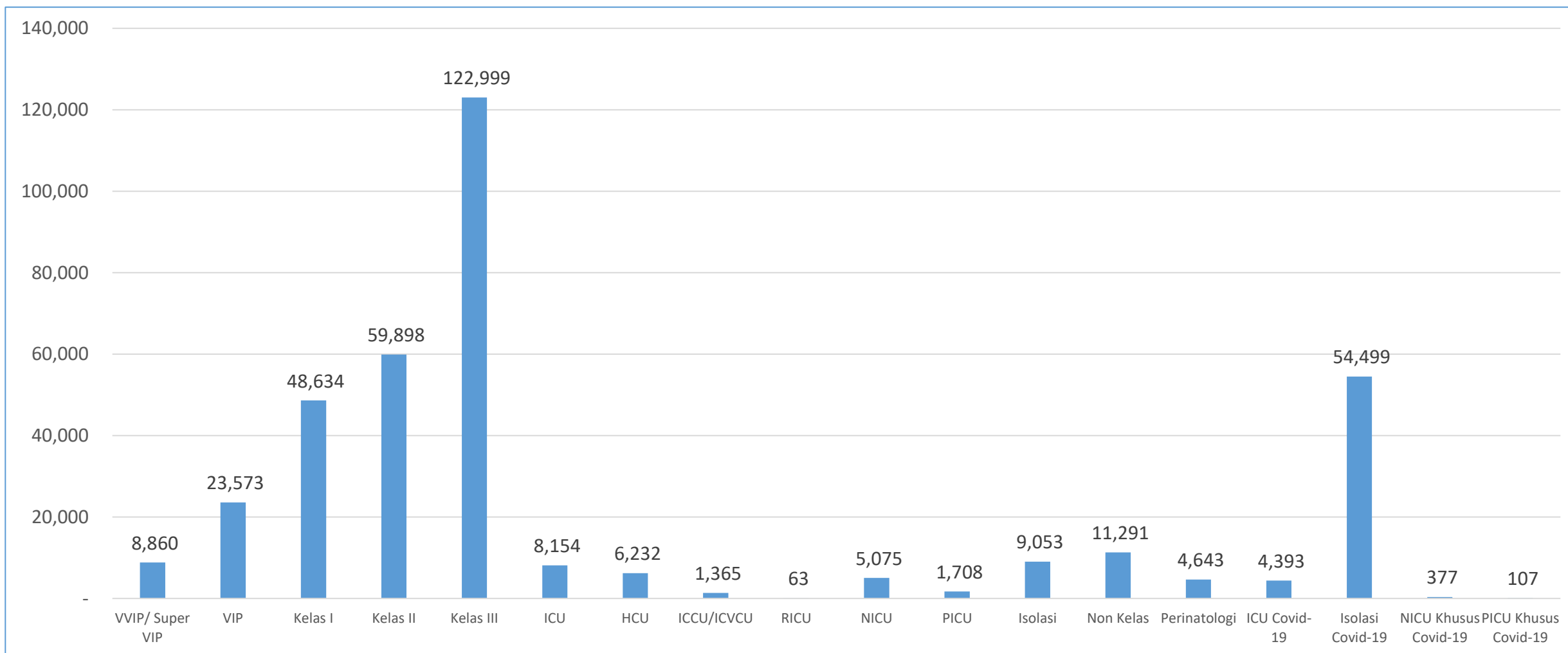
Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah RS	Kab/Kota Tanpa RS
1	Aceh	70	
2	Sumatera Utara	220	Kab. Nias Barat
3	Sumatera Barat	79	
4	Riau	74	
5	Jambi	42	
6	Sumatera Selatan	87	
7	Bengkulu	24	
8	Lampung	80	
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	
10	Kepulauan Riau	36	
11	DKI Jakarta	192	
12	Jawa Barat	375	
13	Jawa Tengah	317	
14	DI Yogyakarta	85	
15	Jawa Timur	393	
16	Banten	119	
17	Bali	72	
18	Nusa Tenggara Barat	39	
19	Nusa Tenggara Timur	53	
20	Kalimantan Barat	54	
21	Kalimantan Tengah	27	
22	Kalimantan Selatan	47	
23	Kalimantan Timur	56	
24	Kalimantan Utara	11	Kab. Bulungan
25	Sulawesi Utara	51	Kab. Bolaang Mongondow Timur
26	Sulawesi Tengah	40	
27	Sulawesi Selatan	114	
28	Sulawesi Tenggara	37	
29	Gorontalo	16	
30	Sulawesi Barat	13	
31	Maluku	31	
32	Maluku Utara	21	
33	Papua Barat	20	Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Tambrauw
34	Papua	47	Kab. Puncak, Kab. Yalimo
INDONESIA		2.967	9 Kab/Kota

RUMAH SAKIT TERAKEDITASI DI INDONESIA S/D TAHUN 2021



Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Indonesia

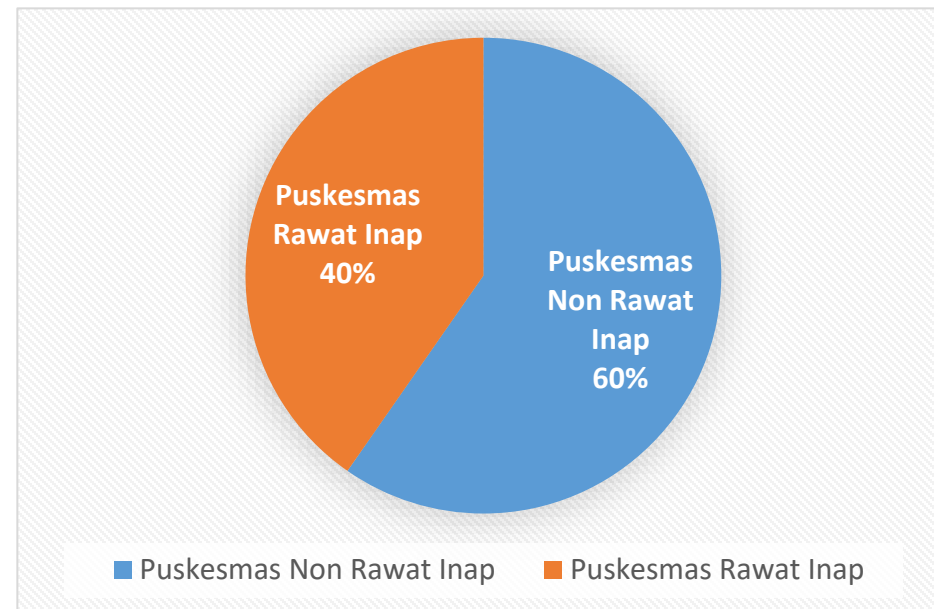


Sumber Data: RS Online

JUMLAH Puskesmas PerPropinsi

NO.	PROVINSI	NON RAWAT INAP	RAWAT INAP	JUMLAH
1	Aceh	178	181	359
2	Sumatera Utara	416	188	604
3	Sumatera Barat	171	104	275
4	Riau	128	102	230
5	Jambi	118	88	206
6	Sumatera Selatan	231	110	341
7	Bengkulu	127	52	179
8	Lampung	172	138	310
9	Kep. Bangka Belitung	38	26	64
10	Kepulauan Riau	50	36	86
11	DKI Jakarta	309	6	315
12	Jawa Barat	773	301	1.074
13	Jawa Tengah	508	370	878
14	DI Yogyakarta	72	49	121
15	Jawa Timur	402	566	968
16	Banten	163	80	243
17	Bali	78	42	120
18	Nusa Tenggara Barat	31	140	171
19	Nusa Tenggara Timur	246	164	410
20	Kalimantan Barat	117	129	246
21	Kalimantan Tengah	117	86	203
22	Kalimantan Selatan	183	53	236
23	Kalimantan Timur	88	98	186
24	Kalimantan Utara	33	22	55
25	Sulawesi Utara	100	95	195
26	Sulawesi Tengah	102	104	206
27	Sulawesi Selatan	157	304	461
28	Sulawesi Tenggara	200	91	291
29	Gorontalo	67	26	93
30	Sulawesi Barat	36	60	96
31	Maluku	148	64	212
32	Maluku Utara	94	53	147
33	Papua Barat	116	45	161
34	Papua	298	126	424
JUMLAH		6.067	4.099	10.166

Sumber Data: Pusat Data dan Informasi 30 Juni 2020

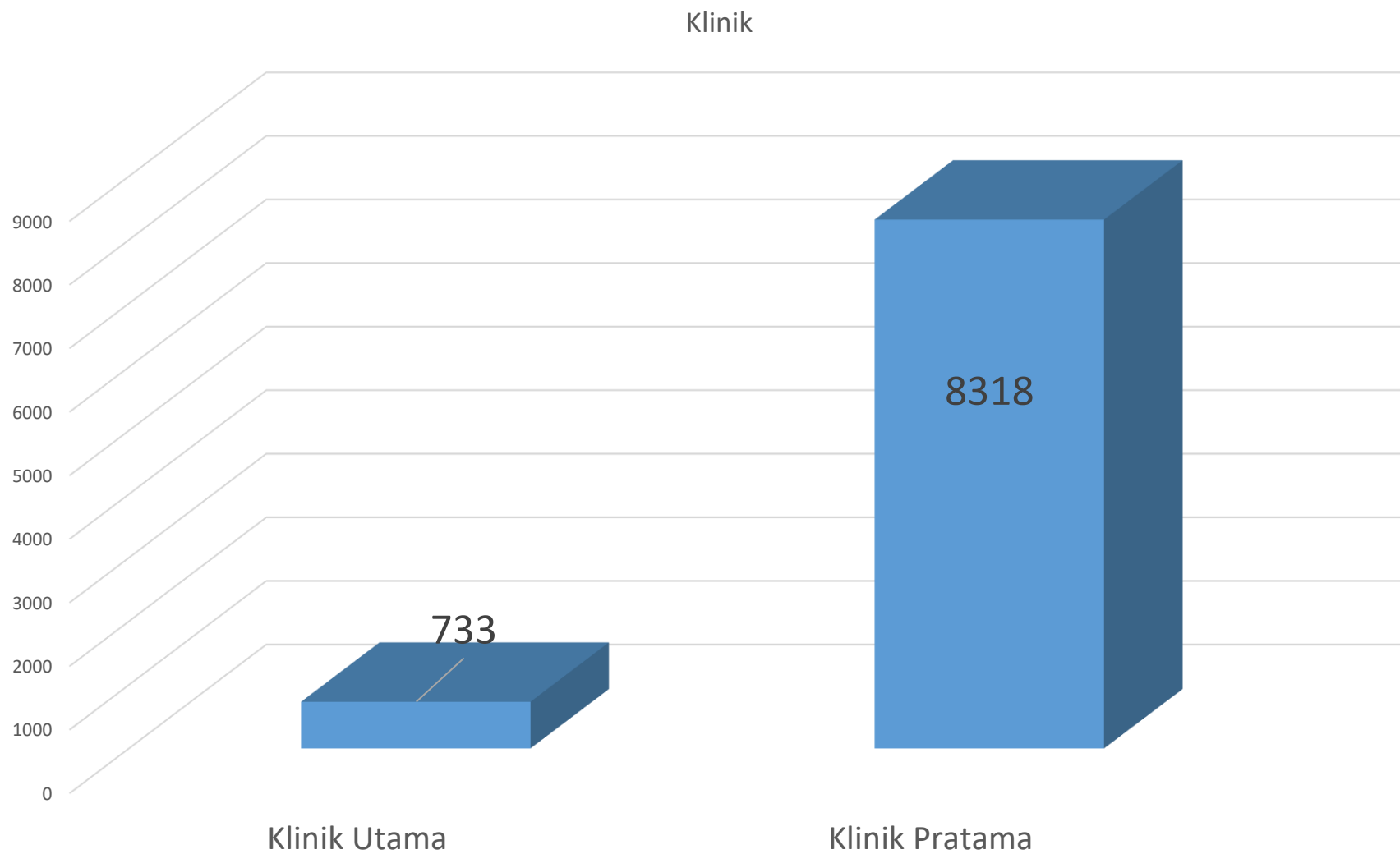


JUMLAH KECAMATAN YANG TIDAK MEMILIKI PUSKESMAS PER PROPINSI

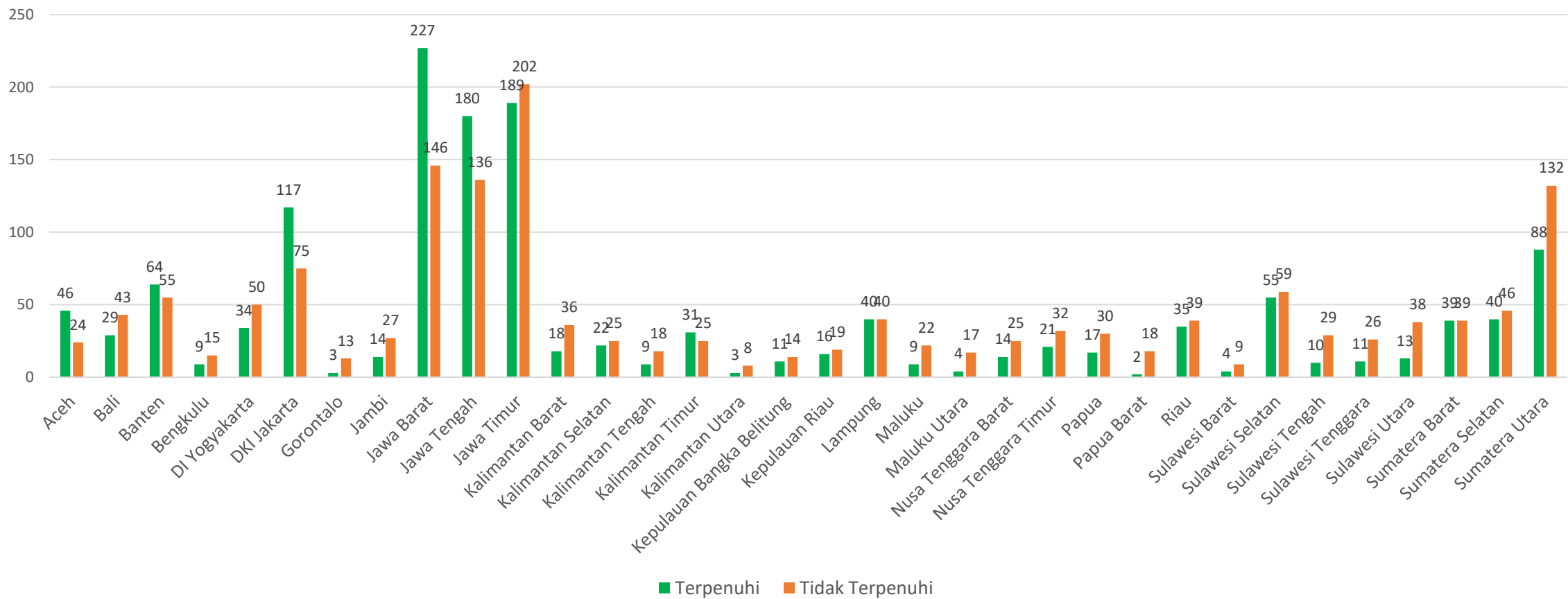
Propinsi	Jumlah
Kalimantan Selatan	1
Kalimantan Utara	3
Kepulauan Riau	5
Papua	115
Papua Barat	41
Sumatera Selatan	4
Sumatera Utara	2
Grand Total	171

Sumber Dit PKP : data februari 2020

JUMLAH KLINIK

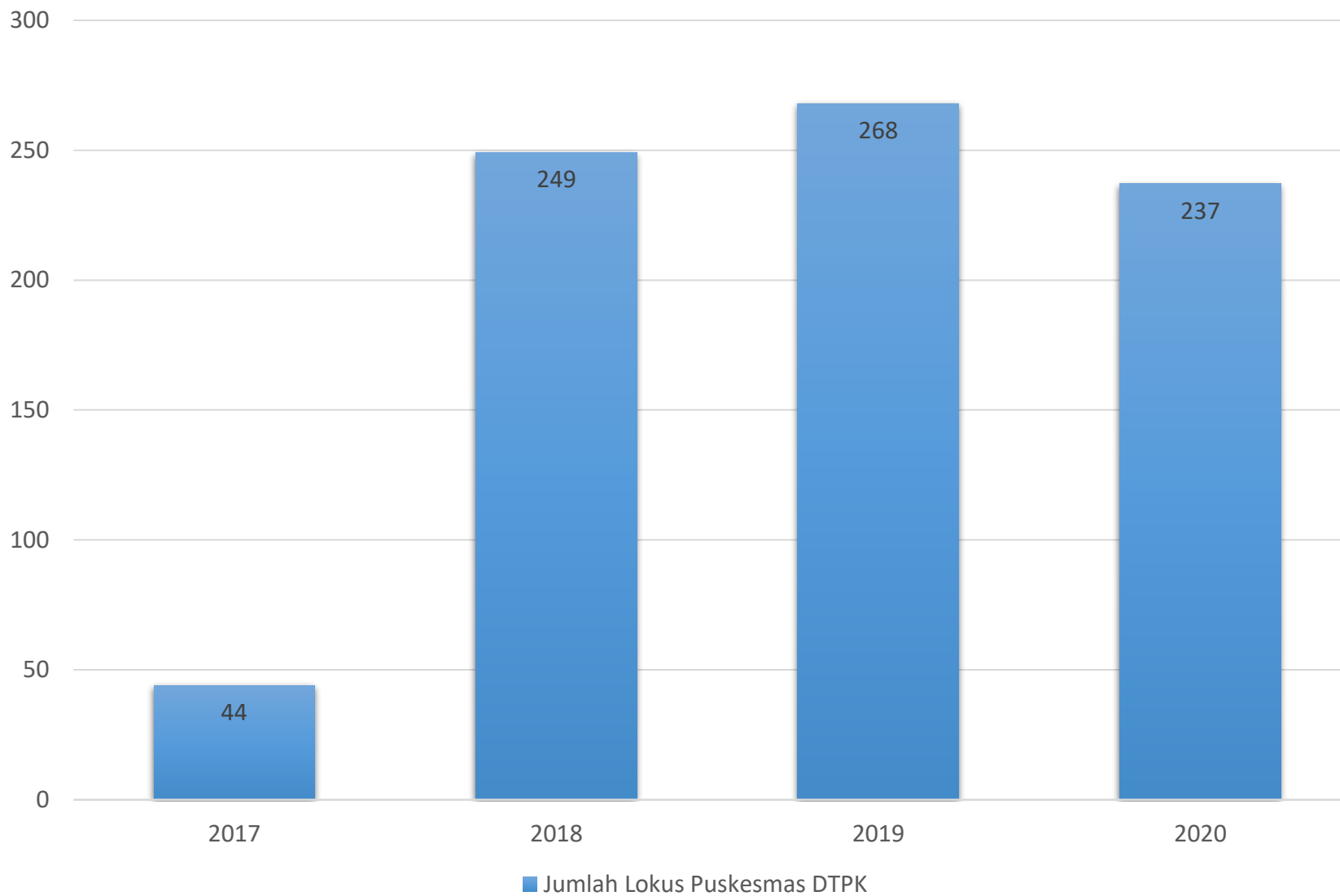


Pemenuhi SPA Per Provinsi di Indonesia

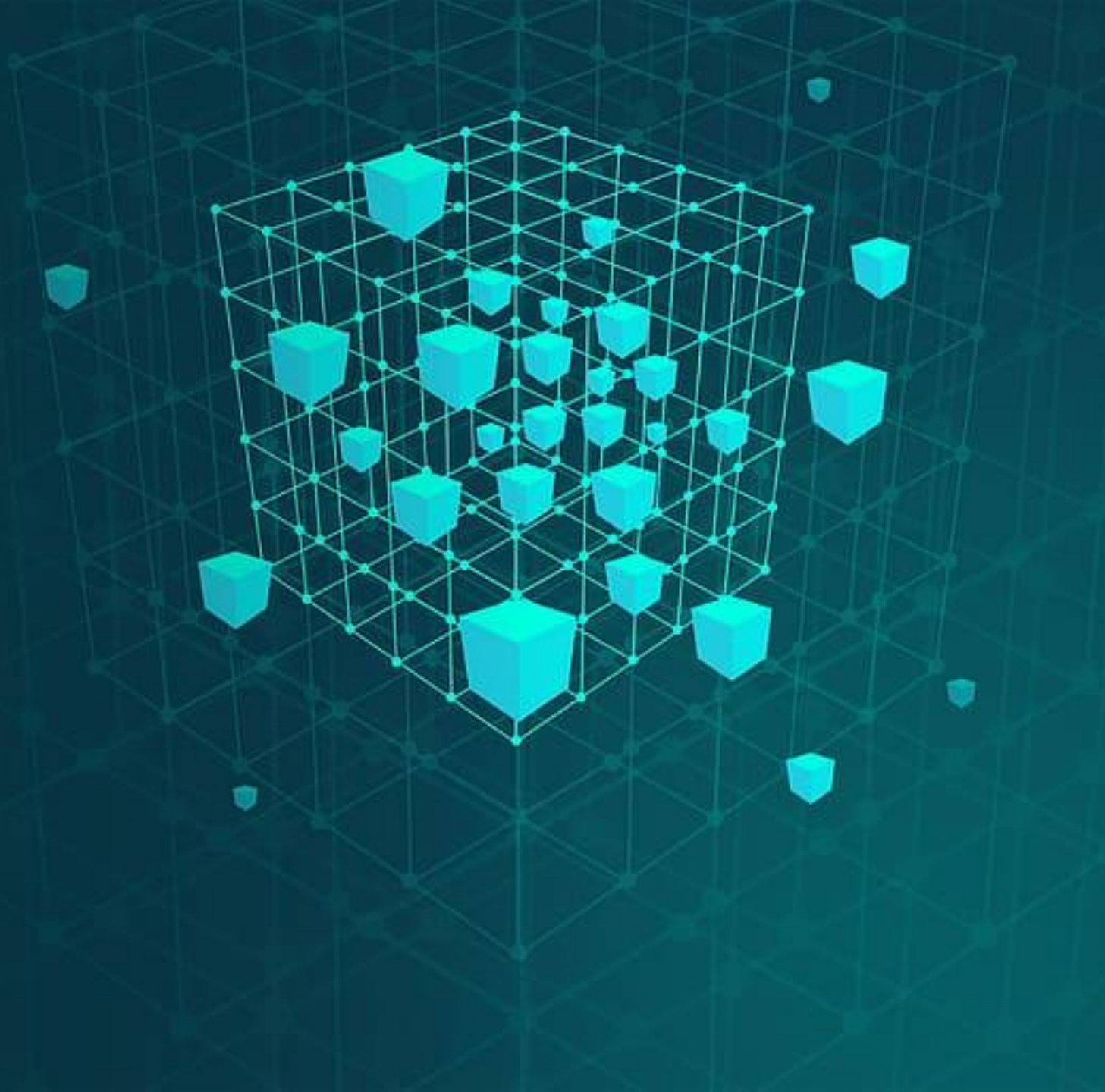


Propinsi	Aceh	Bali	Banten	Bengkulu	DI Yogyakarta	DKI Jakarta	Gorontalo	Jambi	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Kalimantan Barat	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Riau	Lampung	Maluku	Maluku Utara	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Papua	Papua Barat	Riau	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Sumatera Utara
Terpenuhi	46	29	64	9	34	117	3	14	227	180	189	18	22	9	31	3	11	16	40	9	4	14	21	17	2	35	4	55	10	11	13	39	40	88
Tidak Terpenuhi	24	43	55	15	50	75	13	27	146	136	202	36	25	18	25	8	14	19	40	22	17	25	32	30	18	39	9	59	29	26	38	39	46	132

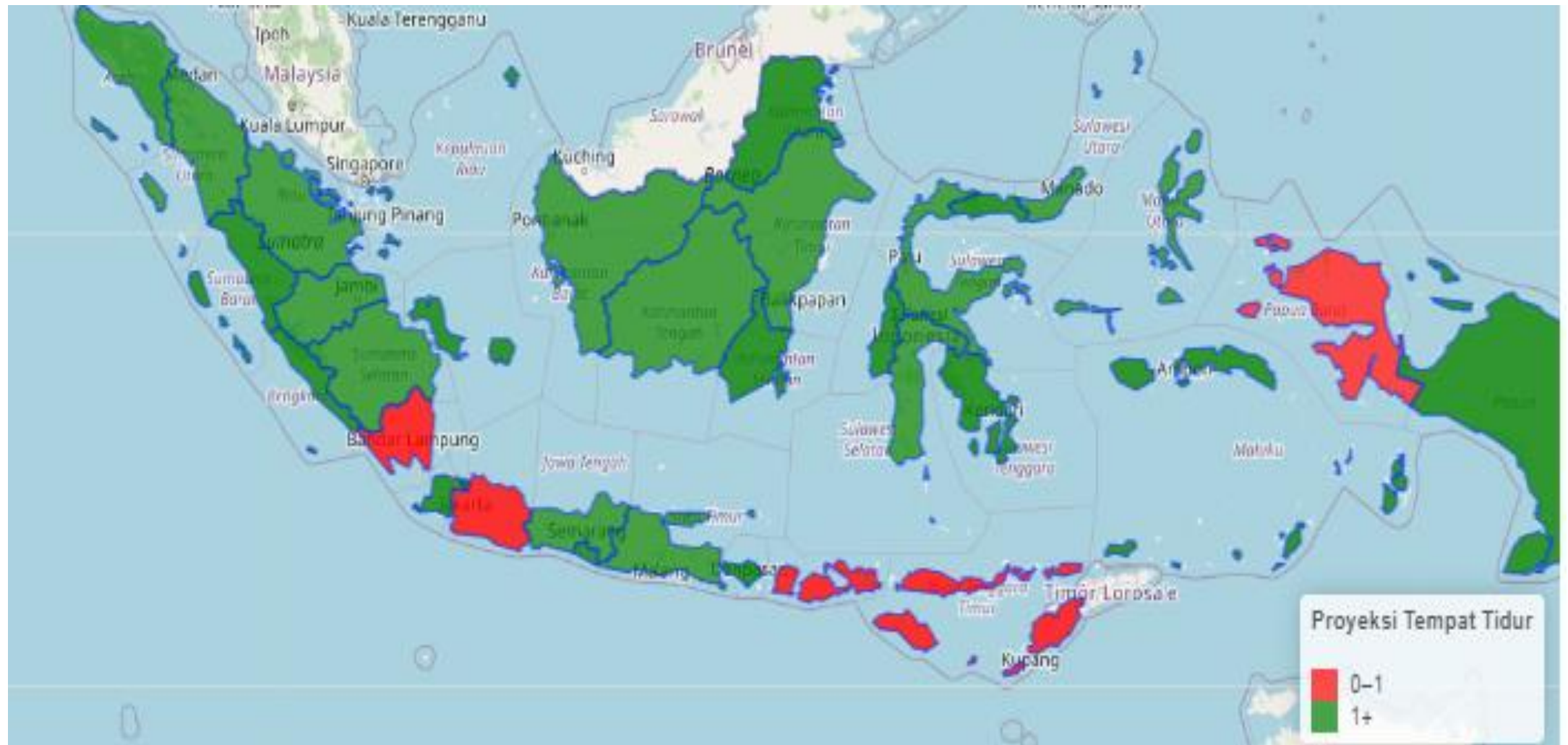
Jumlah Puskesmas Lokus DTPK



SIMULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN TEMPAT TIDUR KELAS STANDAR DAN RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN



Kebutuhan Tempat Tidur RS



NO	Provinsi	Tahun 2020					PROYEKSI Tahun 2025			
		Jumlah Peserta JKN	kebutuhan TT total (1 : 1000)	Ketersediaan TT kelas I, II dan III	Simulasi ketersediaan TT kelas standar (setara kelas 2)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar	Proyeksi Peserta JKN berdasarkan Proyeksi Penduduk Th 2025 (dalam ribuan)	proyeksi kebutuhan TT (1 : 1000)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar	Kebutuhan penambahan setiap tahun
1	Aceh	5,491,492	5,491	7,338	6,154	663	5,870.0	5,870	284	
2	Sumatera Utara	11,018,478	11,018	17,193	13,168	2,150	15,311.2	15,311	-2,143	536
3	Sumatera Barat	4,397,759	4,398	4,662	4,193	-205	5,757.8	5,758	-1,565	391
4	Riau	4,560,717	4,561	4,531	3,797	-764	7,898.5	7,899	-4,102	1,025
5	Jambi	2,574,944	2,575	3,602	2,413	-162	3,926.6	3,927	-1,514	378
6	Sumatera Selatan	6,387,924	6,388	12,104	5,624	-764	9,000.4	9,000	-3,376	844
7	Bengkulu	1,571,317	1,571	1,771	1,562	-9	2,150.5	2,151	-589	147
8	Lampung	6,570,571	6,571	4,987	4,733	-1,838	8,824.6	8,825	-4,092	1,023
9	Kep. Bangka Belitung	1,113,138	1,113	1,647	1,184	71	1,657.5	1,658	-474	118
10	Kepulauan Riau	1,714,440	1,714	1,956	1,794	80	2,501.5	2,502	-708	177
11	DKI Jakarta	17,367,475	17,367	13,005	11,975	-5,392	11,034.0	11,034	941	
12	Jawa Barat	36,379,707	36,380	26,702	25,687	-10,693	52,785.7	52,786	-27,099	6,775
13	Jawa Tengah	28,762,937	28,763	26,579	24,592	-4,171	35,958.6	35,959	-11,367	2,842
14	DI Yogyakarta	3,307,249	3,307	3,878	3,343	36	4,064.6	4,065	-722	180
15	Jawa Timur	28,873,429	28,873	25,177	24,817	-4,056	40,646.1	40,646	-15,829	3,957
16	Banten	10,490,555	10,491	7,313	6,513	-3,978	14,249.0	14,249	-7,736	1,934
17	Bali	4,153,260	4,153	4,449	3,442	-711	4 586.0	4,586	-1,144	286

NO	Provinsi	Tahun 2020					PROYEKSI Tahun 2025			
		Jumlah Peserta JKN	kebutuhan TT total (1 : 1000)	Ketersediaan TT kelas I, II dan III	Simulasi ketersediaan TT kelas standar (setara kelas 2)	simulasi kekurangan/kelebihan TT kelas standar	Proyeksi Peserta JKN berdasarkan Proyeksi Penduduk Th 2025 (dalam ribuan)	proyeksi kebutuhan TT (1 : 1000)	simulasi kekurangan/kelebihan TT kelas standar	Kebutuhan penambahan setiap tahun
18	N T B	4,286,876	4,287	5,967	2,295	-1,992	5,375.6	5,376	-3,081	770
19	N T T	4,451,277	4,451	3,878	3,192	-1,259	5,970.8	5,971	-2,779	695
20	Kalimantan Barat	3,800,389	3,800	3,978	3,705	-95	5,432.6	5,433	-1,728	432
21	Kalimantan Tengah	2,392,436	2,392	8,019	1,517	-875	3,031.0	3,031	-1,514	379
22	Kalimantan Selatan	3,040,886	3,041	3,853	3,210	169	4,578.3	4,578	-1,368	342
23	Kalimantan Timur	3,408,789	3,409	4,511	3,662	253	5,040.7	5,041	-1,379	345
24	kalimantan utara	637,653	638	904	756	118	1,537.0	1,537	-781	195
25	Sulawesi Utara	2,592,532	2,593	5,127	3,682	1,089	2,624.3	2,624	1,058	
26	Sulawesi Tengah	2,684,343	2,684	5,461	2,851	167	3,299.5	3,300	-449	112
27	Sulawesi Selatan	8,471,607	8,472	8,160	7,759	-713	9,265.5	9,266	-1,507	377
28	Sulawesi Tenggara	2,396,515	2,397	2,446	1,653	-744	3,003.0	3,003	-1,350	338
29	Gorontalo	1,132,409	1,132	2,289	1,242	110	1,299.7	1,300	-58	14
30	Sulawesi Barat	1,301,007	1,301	874	711	-590	1,527.8	1,528	-817	204
31	Maluku	1,451,127	1,451	2,061	1,677	226	1,972.7	1,973	-296	74
32	Maluku Utara	909,028	909	1,431	929	20	1,391.0	1,391	-462	116
33	Papua Barat	1,304,143	1,304	1,306	973	-331	1,092.2	1,092	-119	30
34	Papua	3,819,066	3,819	9,630	2,669	-1,150	3,701.7	3,702	-1,033	258

SIMULASI TT DAN PENGANGGARAN KELAS STANDAR RAWAT INAP

NO	Provinsi	Tahun 2020			SIMULASI TAHUN 2020				PROYEKSI Tahun 2025					
		Jumlah Peserta JKN	kebutuhan TT total (1 : 1000)	Ketersediaan TT kelas I, II dan III	TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	TT kelas standar (DENGAN 6 TT)	kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar DENGAN 6 TT	Peserta JKN berdasarkan Proyeksi Penduduk Th 2025 (dalam ribuan)	kebutuhan TT (1:1000)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (6 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (4 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (6 TT)
1	Aceh	5,491,492	5,491	7,338	6,154	6,749	663	1,258	5,870.0	5,870	284	879		
2	Sumatera Utara	11,018,478	11,018	17,193	13,168	15,520	2,150	4,502	15,311.2	15,311	-2,143	209	214,320,000,000	
3	Sumatera Barat	4,397,759	4,398	4,662	4,193	4,858	-205	460	5,757.8	5,758	-1,565	-900	156,480,000,000	90,030,000,000
4	Riau	4,560,717	4,561	4,531	3,797	4,468	-764	-93	7,898.5	7,899	-4,102	-3,431	410,150,000,000	343,100,000,000
5	Jambi	2,574,944	2,575	3,602	2,413	2,780	-162	205	3,926.6	3,927	-1,514	-1,147	151,360,000,000	114,710,000,000
6	Sumatera Selatan	6,387,924	6,388	12,104	5,624	6,472	-764	84	9,000.4	9,000	-3,376	-2,529	337,640,000,000	252,890,000,000
7	Bengkulu	1,571,317	1,571	1,771	1,562	1,809	-9	238	2,150.5	2,151	-589	-342	58,850,000,000	34,150,000,000
8	Lampung	6,570,571	6,571	4,987	4,733	5,427	-1,838	-1,144	8,824.6	8,825	-4,092	-3,398	409,160,000,000	339,810,000,000
9	Kep. Bangka Belitung	1,113,138	1,113	1,647	1,184	1,367	71	253	1,657.5	1,658	-474	-291	47,350,000,000	29,100,000,000
10	Kepulauan Riau	1,714,440	1,714	1,956	1,794	2,124	80	409	2,501.5	2,502	-708	-378	70,750,000,000	37,800,000,000
11	DKI Jakarta	17,367,475	17,367	13,005	11,975	13,874	-5,392	-3,494	11,034.0	11,034	941	2,840		
12	Jawa Barat	36,379,707	36,380	26,702	25,687	30,584	-10,693	-5,796	52,785.7	52,786	-27,099	-22,202	2,709,870,000,000	2,220,220,000,000

Kekurangan TT

Kelebihan TT

SIMULASI TT DAN PENGANGGARAN KELAS STANDAR RAWAT INAP

NO	Provinsi	Tahun 2020			SIMULASI TAHUN 2020				PROYEKSI Tahun 2025					
		Jumlah Peserta JKN	kebutuhan TT total (1 : 1000)	Ketersediaan TT kelas I, II dan III	TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	TT kelas standar (DENGAN 6 TT)	kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar DENGAN 6 TT	Peserta JKN berdasarkan Proyeksi Penduduk Th 2025 (dalam ribuan)	kebutuhan TT (1:1000)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (6 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (4 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (6 TT)
13	Jawa Tengah	28,762,937	28,763	26,579	24,592	28,668	-4,171	-95	35,958.6	35,959	-11,367	-7,291	1,136,660,000,000	729,060,000,000
14	DI Yogyakarta	3,307,249	3,307	3,878	3,343	3,900	36	593	4,064.6	4,065	-722	-165	72,160,000,000	16,460,000,000
15	Jawa Timur	28,873,429	28,873	25,177	24,817	29,146	-4,056	272	40,646.1	40,646	-15,829	-11,501	1,582,910,000,000	1,150,060,000,000
16	Banten	10,490,555	10,491	7,313	6,513	7,876	-3,978	-2,615	14,249.0	14,249	-7,736	-6,373	773,600,000,000	637,300,000,000
17	Bali	4,153,260	4,153	4,449	3,442	3,952	-711	-201	4,586.0	4,586	-1,144	-634	114,400,000,000	63,400,000,000
18	N T B	4,286,876	4,287	5,967	2,295	2,563	-1,992	-1,724	5,375.6	5,376	-3,081	-2,813	308,060,000,000	281,310,000,000
19	N T T	4,451,277	4,451	3,878	3,192	3,566	-1,259	-886	5,970.8	5,971	-2,779	-2,405	277,880,000,000	240,530,000,000
20	Kalimantan Barat	3,800,389	3,800	3,978	3,705	4,269	-95	468	5,432.6	5,433	-1,728	-1,164	172,760,000,000	116,410,000,000
21	Kalimantan Tengah	2,392,436	2,392	8,019	1,517	1,795	-875	-598	3,031.0	3,031	-1,514	-1,237	151,400,000,000	123,650,000,000
22	Kalimantan Selatan	3,040,886	3,041	3,853	3,210	3,693	169	652	4,578.3	4,578	-1,368	-886	136,830,000,000	88,580,000,000
23	Kalimantan Timur	3,408,789	3,409	4,511	3,662	4,267	253	858	5,040.7	5,041	-1,379	-774	137,870,000,000	77,370,000,000
24	kalimantan utara	637,653	638	904	756	864	118	226	1,537.0	1,537	-781	-674	78,100,000,000	67,350,000,000

Kekurangan TT

Kelebihan TT

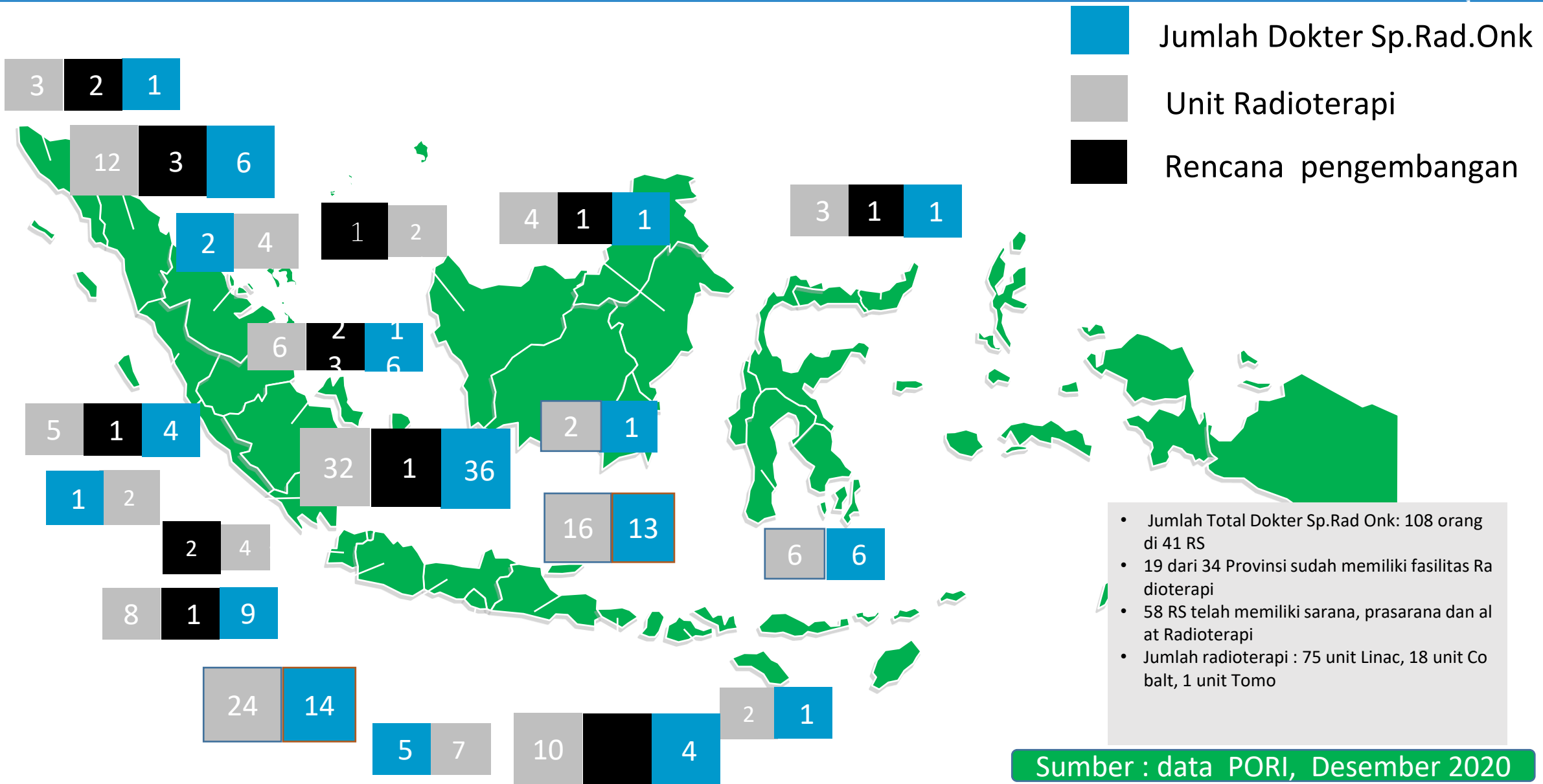
SIMULASI TT KELAS STANDAR (3)

NO	Provinsi	Tahun 2020			SIMULASI TAHUN 2020				PROYEKSI Tahun 2025					
		Jumlah Peserta JKN	kebutuhan TT total (1 : 1000)	Ketersediaan TT kelas I, II dan III	TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	TT kelas standar (DENGAN 6 TT)	kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (DENGAN 4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar DENGAN 6 TT	Peserta JKN berdasarkan Proyeksi Penduduk Th 2025 (dalam ribuan)	kebutuhan TT (1:1000)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (4 TT)	simulasi kekurangan/ kelebihan TT kelas standar (6 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (4 TT)	KEBUTUHAN BIAYA (6 TT)
25	Sulawesi Utara	2,592,532	2,593	5,127	3,682	4,316	1,089	1,723	2,624.3	2,624	1,058	1,692		
26	Sulawesi Tengah	2,684,343	2,684	5,461	2,851	3,225	167	540	3,299.5	3,300	-449	-75	44,850,000,000	7,500,000,000
27	Sulawesi Selatan	8,471,607	8,472	8,160	7,759	9,040	-713	568	9,265.5	9,266	-1,507	-226	150,650,000,000	22,550,000,000
28	Sulawesi Tenggara	2,396,515	2,397	2,446	1,653	1,852	-744	-545	3,003.0	3,003	-1,350	-1,152	135,000,000,000	115,150,000,000
29	Gorontalo	1,132,409	1,132	2,289	1,242	1,392	110	259	1,299.7	1,300	-58	92	5,770,000,000	
30	Sulawesi Barat	1,301,007	1,301	874	711	813	-590	-488	1,527.8	1,528	-817	-715	81,680,000,000	71,480,000,000
31	Maluku	1,451,127	1,451	2,061	1,677	1,857	226	405	1,972.7	1,973	-296	-116	29,570,000,000	11,620,000,000
32	Maluku Utara	909,028	909	1,431	929	1,062	20	152	1,391.0	1,391	-462	-330	46,200,000,000	32,950,000,000
33	Papua Barat	1,304,143	1,304	1,306	973	1,104	-331	-200	1,092.2	1,092	-119	12	11,920,000,000	
34	Papua	3,819,066	3,819	9,630	2,669	2,971	-1,150	-849	3,701.7	3,702	-1,033	-731	103,270,000,000	73,120,000,000
TOTAL													10,117,470,000,000	7,387,660,000,000

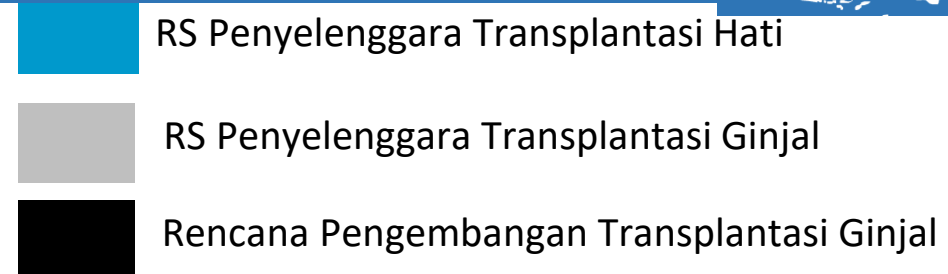
Kekurangan TT

Kelebihan TT

DISTRIBUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN RADIOTERAPI







KESIMPULAN

- PP 47 Tahun 2021, PP 5 Tahun 2021 dan PMK 14 Tahun 2021 membuka peluang investasi pendirian rumah sakit baru.
- Klasifikasi RS berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.
- Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat,
- Dampak PP 47 Tahun 2021 terhadap Kelas Standar Rawat Inap, terdapat komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan kebutuhan tempat tidur per kabupaten kota dimana kesenjangan variasi antar daerah tinggi.
- Sejak Tahun 2014 awal pelaksanaan JKN, Pemerintah Komitmen terhadap standar penyediaan kebutuhan Tempat Tidur, perlu dukungan Lintas Sektor agar Pemerintah Daerah mendorong pengambilan menu DAK terhadap Tempat Tidur dan Bangunannya.
- Pelayanan lain : Radiotherapi, Jantung dan ginjal, akan terus ditingkatkan disesuaikan utilisasi penyakit di wilayah, secara efektif dan efisien.
- Pemilik RS harus ber-Investasi SDM dan Infrastruktur untuk berkompetitif dengan RS lain



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950



www.yankes.kemkes.go.id



www.facebook.com/ditjen.yankes



[@ditjenyankes](https://www.instagram.com/ditjenyankes)



[@ditjenyankes](https://twitter.com/ditjenyankes)

Terima Kasih